



EVALUASI PENERAPAN PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER DI KOTA SURAKARTA

Titin Dwi Aryanti^{1*}), Suryanto²

¹Universitas Sebelas Maret; ²Universitas Sebelas Maret

¹tdwiaryanti.titin@student.uns.ac.id; ²suryanto@staff.uns.ac.id

*) Penulis Korespondensi : tdwiaryanti.titin@student.uns.ac.id

Abstract. *The problem of poverty is still the main focus of world governments today. One of the government's efforts to overcome poverty is by implementing the Conditional Transfer (CCT) program. In short, CCT is assistance provided to beneficiaries with certain conditions. The CCT currently being implemented in the City of Surakarta is the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT). This research intends to evaluate the conditional cash transfer (CCT) program which focuses on the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Surakarta City Social Service. The research approach used is quantitative, using the Importance Performance Analysis (IPA) and Customer Satisfaction Index (CSI) methods. The research results show that there are still several attributes that require improvement to be able to reduce poverty to the maximum. The results of the overall satisfaction index for the people of Surakarta City show 62.07%, which indicates a Very Poor interpretation where service users or the people of Surakarta City feel dissatisfied with the performance of service providers or the government. The implication of this research is that the government can improve performance on high priority attributes, especially in the planning dimension. There needs to be good cooperation between the government, lower level officers and the community in maintaining performance in the implementation dimension.*

Keyword: *conditional cash transfer, poverty, inequality*

Abstraksi. *Masalah kemiskinan masih menjadi fokus utama pemerintahan dunia saat ini. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ialah dengan menjalankan program Conditional Transfer (CCT). Secara singkat CCT merupakan bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat dengan kondisi tertentu. CCT yang saat ini dijalankan di Kota Surakarta ialah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) yang berfokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kota Surakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi dengan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa atribut yang memerlukan perbaikan untuk dapat menekan angka kemiskinan secara maksimal. Hasil indeks kepuasan masyarakat Kota Surakarta secara keseluruhan*

menunjukkan sebesar 62,07% yang menunjukkan interpretasi Very Poor dimana pengguna layanan jasa atau masyarakat Kota Surakarta merasa tidak puas dengan kinerja penyedia jasa atau pemerintah. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah dapat meningkatkan kinerja pada atribut dengan prioritas tinggi khususnya dalam dimensi perencanaan. Perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, petugas tingkat bawah, dan masyarakat dalam mempertahankan kinerja pada dimensi pelaksanaan

Kata kunci: bantuan tunai bersyarat, kemiskinan, ketimpangan.

diunggah: September 2024; direvisi: Februari 2025; disetujui: Mei 2025

This is an open access article under the CC-BY licence



© the Author(s). 2025

Cara Sitasi: Aryanti Titin Dwi, Suryanto (2025). EVALUASI PENERAPAN PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER DI KOTA SURAKARTA. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*,9(1), 273-293. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.495>

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang menjadi fokus pemerintah saat ini utamanya dalam mengentaskan kemiskinan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyepakati Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs telah disepakati dalam sidang umum PBB yang dihadiri oleh 193 kepala negara dan pemerintahan dunia. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi secara berkesinambungan.

Negara-negara telah menyepakati agenda global 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan “no poverty” telah menjadi tujuan utama rencana tersebut (United Nations, 2015). Masalah kemiskinan yang melatarbelakangi agenda utama dari pembangunan berkelanjutan sejak dirumuskannya MDGs hingga saat ini masih menjadi persoalan SDGs yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2030. Menurut Poverty & Inequality Platform oleh World Bank, sejumlah 712 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan global yang belum terselesaikan.

Data pada laporan PBB State of World Population 2023, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia. Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah 278,69 juta jiwa, dimana sebesar 25,90 juta diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36% per Maret 2023. Tingkat kemiskinan Indonesia ditargetkan mencapai 7,5-8,5 persen di tahun 2023.

Ketimpangan yang berinteraksi dengan tingginya tingkat kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Breunig & Majeed 2020). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Stiglitz (2013) dalam bukunya yang berjudul *The Price of Inequality* bahwa kemiskinan dan ketimpangan juga dapat saling berinteraksi sehingga memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kouadio & Gakpa, (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan secara keseluruhan dalam perekonomian. Menurut Ravallion (2016) dalam bukunya *The Economics of Poverty*, kemiskinan dapat mendorong peningkatan populasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Teori Keynesian menyebutkan bahwa campur tangan pemerintah akan sangat dibutuhkan dalam mengendalikan perekonomian termasuk persoalan kemiskinan. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surakarta, upaya pemerintah dalam menanggulangi persoalan kemiskinan melalui penyediaan anggaran sejumlah Rp. 262.177.368.153,- untuk penanggulangan kemiskinan pada perangkat daerah, dan sejumlah Rp. 25.103.786.000 untuk Dinas Sosial Kota Surakarta pada tahun 2023. Pemerintah Kota Surakarta telah mengupayakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, yakni dengan melakukan pendampingan penanggulangan kemiskinan di 5 kecamatan di Kota Surakarta.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di tingkat daerah. Program Conditional Cash Transfer (CCT) yang diimplementasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi strategi penting dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus mendorong akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kota Surakarta, dengan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat, telah menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam mengimplementasikan program ini. Tujuan 6 yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2021-2026 yang menyatakan terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan akan direalisasikan melalui beberapa program unggulan walikota. Salah satu program unggulan Walikota Surakarta ialah pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin yang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Surakarta.

World Bank menggunakan indikator distribusi pendapatan penduduk menurut kelompok pendapatan guna mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat perkembangan ketimpangan

pendapatan golongan 40% bawah di Kota Surakarta hanya menunjukkan angka 15.5% pada tahun 2022. Dalam arti penduduk golongan pengeluaran terendah Kota Surakarta hanya menikmati rata-rata 15.5% dari total pengeluaran. Walaupun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dari Jawa Tengah yakni sebesar 18.74% dan Kota Surakarta menempati posisi tiga terbawah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah diukur berdasarkan distribusi pengeluaran menurut kriteria World Bank Tahun 2021-2023.

Beberapa negara maju telah menerapkan *Conditional Cash Transfer* (CCT) sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Program sejenis telah dilakukan di Kota Surakarta yang dinamakan sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program BPNT telah berjalan sejak tahun 2017, sementara PKH dijalankan sejak 2007. Penelitian mengenai CCT di berbagai negara sudah banyak dilakukan di kalangan peneliti. Namun, masih ditemukan konsistensi yang belum stabil dalam artian penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda. CCT membantu rumah tangga miskin melakukan investasi yang signifikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, sebagian besar manfaat ekonomi dari CCT kemungkinan besar berasal dari pengurangan transmisi kemiskinan antargenerasi (Cahyadi et al., 2020). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Parawangi & Wahid, (2023) yakni pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kota Makassar dapat mengurangi kemiskinan dengan signifikan. Hasil yang berbeda diungkap dalam penelitian Hastuti et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa CCT belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi KPM. Penelitian oleh Kitaura & Miyazawa, (2021) juga mengungkapkan bahwa bantuan tunai bersyarat hanya akan mengatasi kemiskinan pada jangka pendek dan akan meperburuk ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti kewajiban untuk menjaga anak-anak bersekolah dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian oleh Kementerian Sosial RI dan Bappenas pada Tahun 2017 menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak dari keluarga penerima PKH lebih cenderung melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, serta lebih terjangkau untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah program pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta sudah cukup efektif dan mampu mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Surakarta atau masih diperlukan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif fenomenologi yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian melibatkan penggunaan *mixed methods* untuk menganalisis data. Metode ini mencakup analisis IPA (*Importance Performance Analysis*) dan CSI (*Customer Satisfaction Index*). Tahap pertama adalah mengumpulkan data, tahap kedua adalah menganalisis data, dan tahap ketiga adalah mengidentifikasi kesenjangan serta menghitung skor indeks. Hasil analisis data menggunakan metode IPA, dibagi menjadi 4 kuadran yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Kuadran I (Prioritas Utama)

Atribut atribut yang termasuk pada kuadran I merupakan hal yang harus mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kinerjanya. Keberadaan atribut ini dinilai memiliki tingkat kepentingan yang tinggi sehingga dianggap sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk memperoleh kepuasan yang maksimal.

b. Kuadran 2 (Pertahankan Prestasi)

Atribut atribut yang termasuk dalam kuadran II dinilai memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan telah sesuai dengan pelaksanaannya.

c. Kuadran 3 (Prioritas Rendah)

Kuadran 3 menunjukkan bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh petugas dinilai rendah atas atribut yang ada, masyarakat juga menganggap bahwa tingkat kepentingan atribut ini tidak terlalu tinggi.

d. Kuadran 4 (Berlebihan)

Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran 4 mempunyai ciri-ciri kinerja tingkat tinggi namun dianggap tidak penting bagi masyarakat sehingga keberadaannya perlu diperimbangkan oleh pemerintah (Ristanti & Suryanto, 2023).

Penelitian ini dimulai dengan mengamati fenomena di lapangan, termasuk mengamati kondisi perekonomian masyarakat Kota Surakarta. Pengamatan mengenai fenomena yang terjadi dilakukan di 5 kecamatan yang meliputi Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres. Kemiskinan di Surakarta sering kali dihubungkan dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta keterbatasan lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduk dengan keterampilan rendah. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan di Surakarta adalah

tingginya biaya hidup, terutama terkait dengan kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, dan pendidikan. Berdasarkan pengamatan, permasalahan dapat dirumuskan mengenai persepsi warga Surakarta terhadap upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi kemiskinan di Kota Surakarta.

Langkah berikutnya adalah melakukan studi literatur untuk memperoleh teori atau data sekunder yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk menggali permasalahan di lapangan dan mencari pembenaran menurut para ahli selama wawancara. Sementara itu, wawancara dilakukan di Dinas Sosial Kota Surakarta sebagai pelaksana kebijakan di bidang terkait. Pada tahap ini, wawancara dilakukan untuk memperdalam informasi terkait atribut yang akan digunakan dalam penelitian berdasarkan penjelasan pelaksana kebijakan.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data primer mengenai persepsi warga Surakarta terkait kualitas layanan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini mengumpulkan data dalam bentuk skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Slamet (2006) menyatakan bahwa penggunaan skala Likert dapat mengembangkan berbagai jawaban, namun masih dalam kerangka skala empat poin. Setiap jawaban ini akan memperoleh skor penilaian berdasarkan persepsi warga. Persepsi warga dalam penelitian ini didasarkan pada bagaimana mereka merasakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam penelitian yang menggunakan metode *Customer Satisfaction Index* (CSI), kuesioner dirancang untuk mengukur kepuasan penerima manfaat terhadap program atau layanan yang diberikan. CSI menggabungkan berbagai atribut yang dipandang penting oleh konsumen, dalam hal ini penerima manfaat, untuk mengevaluasi kualitas layanan atau program yang diterima. Substansi kuesioner dengan metode CSI yang menggunakan 4 dimensi, yakni perencanaan, pelaksanaan, keberlanjutan, dan kendala. Melalui dimensi-dimensi tersebut, kuesioner dengan metode CSI memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai aspek kualitas layanan atau program dan menghasilkan *Customer Satisfaction Index* yang mencerminkan tingkat kepuasan penerima manfaat secara keseluruhan. Hasil dari CSI ini dapat memberikan wawasan penting mengenai area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program.

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan observasi penulis sebelum kemudian diolah dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat harapan dan tingkat kenyataannya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Uji validitas dan realibilitas dilakukan dengan tujuan agar setiap indikator dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Uji validitas dilakukan melalui uji korelasi satu sisi sehingga didapatkan nilai r hitung dengan nilai r tabel pada *degree of*

freedom (df) = n-2, dengan tingkatan probabilitas kesalahan 0,05. Bila nilai r hitung > nilai r tabel serta nilai r positif, butir-butir kuesioner dinyatakan valid. Uji realibilitas pada penelitian ini memakai uji statistic *Cronbach Alpha* seluruh variabel > 0,6 sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. Atribut-atribut dari setiap kuadran menunjukkan bagaimana atribut tersebut diperlakukan, yaitu apakah perlu ditingkatkan, dipertahankan, ditinjau, atau dihapus. Hasil pengolahan data kemudian diinterpretasikan dalam diagram kartesius kemudian dilakukan analisis. Hasil olah data kemudian dikelompokkan menjadi empat bagian sesuai dengan prioritas kepentingan diantaranya kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV.

Atribut dari masing-masing kuadran dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kuadran I memuat atribut yang menjadi prioritas paling utama. Atribut yang terdapat pada kuadran II ialah atribut yang harus dipertahankan kinerjanya. Kuadran III memuat atribut yang kurang penting, dan kuadran IV merupakan atribut yang memiliki kinerja yang berlebih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data primer melalui penyebaran kuesioner dan memperoleh 100 responden dari 43,89 ribu masyarakat miskin di Kota Surakarta. Jumlah responden yang paling banyak berada di usia 64 tahun keatas yakni sejumlah 31% dari total jumlah responden. Proporsi di bawahnya terdapat responden dengan usia 51 – 64 dengan presentase 28%. Responden dengan rentang usia 31 – 50 tahun berjumlah 23%. Pada rentang usia 18 – 30 terdapat 18% responden yang mana jumlah ini paling sedikit dibandingkan dengan kategori umur lainnya. Dari tabel tersebut juga diketahui sebanyak 31 orang dikategorikan termasuk dalam usia non produktif dan 69 lainnya berada pada usia produktif. Penghasilan rata-rata selama satu bulan perlu untuk diketahui sebagai salah satu indikator untuk memperkirakan kesejahteraan dari responden. penghasilan rata – rata responden dengan jumlah terbanyak ada pada kategori 2 yakni Rp.1.000.000 – 2.000.000 dengan jumlah responden 67 orang. Dan penghasilan di atas Rp. 2.000.000 sejumlah 10 orang. Responden dengan rata – rata penghasilan Rp.1000.000 setiap bulan terdapat 23 orang.

Tabel 1
Hasil Analisis Gap Metode *Importance Performance Analysis*

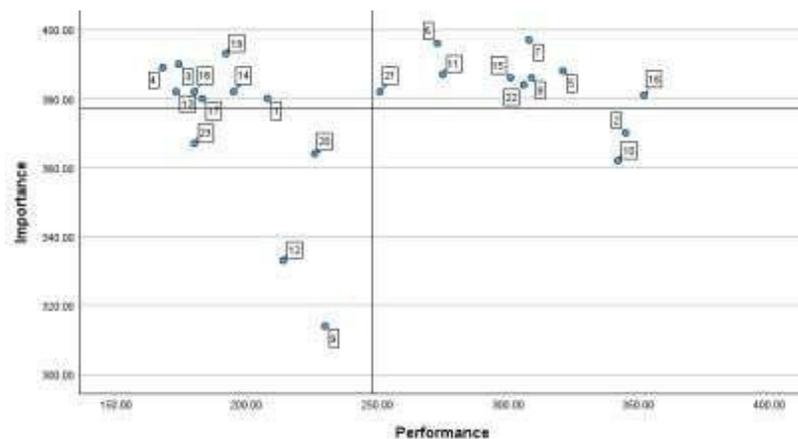
	PERENCANAAN	Harapan	Kinerja	GAP
1	Sosialisasi oleh petugas dapat dimengerti dengan jelas	3.80	2.08	1.72
2	Semua kelompok atau orang yang berhak menerima bantuan sudah mendapatkan sosialisasi oleh petugas	3.70	3.45	0.25

	sebelum bantuan diberikan			
3	Proses penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sudah adil	3.90	1.74	2.16
4	Proses penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sudah merata	3.89	1.68	2.21
	PELAKSANAAN			0.67
5	Bantuan yang diterima Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan yang dijanjikan	3.88	3.21	1.23
6	Bantuan sudah diterima oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) secara adil	3.96	2.73	0.89
7	Bantuan sudah terdistribusikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) secara merata	3.97	3.08	0.77
8	Pendistribusian bantuan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur	3.86	3.09	0.84
9	Petugas mampu memberikan solusi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program	3.14	2.30	0.20
10	Petugas mampu melayani Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan komunikatif	3.62	3.42	1.12
11	Persyaratan bantuan dapat dipenuhi dengan baik oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	3.87	2.75	1.19
	KEBERLANJUTAN			1.9
12	Petugas melakukan monitoring selama pelaksanaan program	3.33	2.14	1,87
13	Petugas memberikan teguran apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya	3.82	1.73	0.85
14	Adanya peningkatan pendapatan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setelah terlaksananya program	3.82	1.95	0.29
15	Adanya peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setelah terlaksananya program	3.86	3.01	1.97
16	Keberlanjutan program perlu untuk dijaga	3.81	3.52	2.02
	KENDALA			2.01
17	Pendataan secara berkala oleh petugas	3.80	1.83	1.38
18	Ketidaktegasan petugas dalam memberikan teguran bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi aturan	3.82	1.80	1.31

19	Ketidaktegasan petugas dalam memberikan sanksi pencabutan manfaat bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi aturan secara terus menerus	3.93	1.92	0.78
20	Petugas/aparat desa solutif dalam memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	3.64	2.26	1.87

Sumber: Data primer, diolah 2023.

Tabel 1 menunjukkan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja penanganan program pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta yang diukur melalui 23 item. Dapat dilihat bahwa harapan selalu lebih tinggi dari kinerja aktual. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya evaluasi untuk mencapai hasil akhir yang maksimal. Hasil tersebut dapat dilihat Tingkat prioritasnya melalui diagram kartesius. Sumbu X menggambarkan performance atau kinerja, sedangkan sumbu Y menggambarkan importance atau tingkat kepentingan.



Gambar 2. Diagram Kartesius
 Sumber: Data primer, diolah 2023.

Gambar 2 menunjukkan sumbu x (performance) berada pada 377.1 dan sumbu y (importance) berada pada 248.0. Dari angka tersebut menghasilkan titik yang membagi kuadran menjadi empat bagian. Dari hasil diagram kartesius di atas, di bawah ini merupakan hasil interpretasi dari setiap item.

a. Kuadran I (Prioritas Utama)

Berikut merupakan atribut yang termasuk dalam kuadran I:

- 1) Sosialisasi oleh petugas dapat dimengerti dengan jelas (1)
- 2) Proses penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sudah adil (3)
- 3) Proses penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sudah merata (4)

- 4) Petugas memberikan teguran apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya (13)
- 5) Adanya peningkatan pendapatan setelah terlaksananya program (14)
- 6) Pendataan secara berkala oleh petugas (17)
- 7) Teguran bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi aturan oleh petugas (18)
- 8) Sanksi pencabutan manfaat bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi aturan secara terus menerus (19)

b. Kuadran 2 (Pertahankan Prestasi)

Berikut merupakan atribut yang termasuk dalam kuasran II:

- 1) Bantuan yang diterima sudah sesuai dengan yang dijanjikan (5)
- 2) Bantuan sudah diterima secara adil (6)
- 3) Bantuan sudah terdistribusikan secara merata (7)
- 4) Pendistribusian bantuan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur (8)
- 5) Persyaratan bantuan dapat dipenuhi dengan baik (11)
- 6) Adanya peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup setelah terlaksananya program (15)
- 7) Keberlanjutan program perlu untuk dijaga (16)
- 8) Administrasi bantuan sulit dipenuhi (21)
- 9) Bantuan dari pemerintah dikelola dengan sebagaimana mestinya (22)

c. Kuadran 3 (Prioritas Rendah)

Atribut yang termasuk dalam kuadran III ialah sebagai berikut:

- 1) Petugas mampu memberikan solusi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program (9)
- 2) Petugas melakukan monitoring selama pelaksanaan program (12)
- 3) Petugas/aparat desa solutif dalam memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (20)
- 4) Kepekaan masyarakat dalam melaporkan data terbaru ketika kondisi ekonomi sudah tidak layak untuk diberi bantuan (23)

d. Kuadran 4 (Berlebihan)

Atribut yang termasuk dalam kuadran IV:

- 1) Semua kelompok atau orang yang berhak menerima bantuan sudah mendapatkan sosialisasi oleh petugas sebelum bantuan diberikan. (2)
- 2) Petugas mampu melayani dengan komunikatif (10)

3. Customer Satisfaction Index (CSI)

Metode *Customer Satisfaction Index* (CSI) digunakan pada penelitian ini untuk mengukur tingkat kepuasan dari masyarakat terkait program bantuan sosial di Kota Surakarta baik tunai maupun non tunai. Pengukuran ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar harapan dari masyarakat Kota Surakarta yang dapat dipenuhi dan apakah nilai rata rata harapan dapat dipenuhi dengan nilai rata rata kenyataan pada kinerja pemerintah Kota Surakarta. Dalam konteks evaluasi program sosial seperti Conditional Cash Transfer (CCT), pendekatan berbasis indeks kepuasan, seperti Customer Satisfaction Index (CSI), dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana penerima manfaat memandang

efektivitas program tersebut. Metode CSI memungkinkan pengukuran kepuasan berdasarkan pengalaman langsung pengguna dengan layanan yang diberikan, sehingga menjadi alat yang relevan untuk mengevaluasi program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program CCT dapat diukur menggunakan CSI karena fokusnya pada pengalaman penerima manfaat, yang merupakan inti dari keberhasilan program. Dengan mengukur kepuasan menggunakan CSI, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program, serta merumuskan strategi perbaikan berdasarkan umpan balik langsung dari masyarakat. Hal ini meningkatkan akuntabilitas program dan memastikan bahwa manfaat yang diterima benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat sesuai dengan tujuan program.

Tabel 2
 Hasil Pengolahan Data Menggunakan Metode *Customer Satisfaction Index*

No Atribut	Expectation Level (Y)		Level of Reality (X)		WF	WS
	Sum of Y Values	MIS Value	Sum of X Values	MSS Value		
1	380	3,8	208	2,08	4,380908	9,11229
2	370	3,7	345	3,45	4,265621	14,71639
3	390	3,9	174	1,74	4,496196	7,82338
4	389	3,89	168	1,68	4,484667	7,53424
5	388	3,88	321	3,21	4,473138	14,35877
6	396	3,96	273	2,73	4,565368	12,46345
7	397	3,97	308	3,08	4,576896	14,09684
8	386	3,86	309	3,09	4,450081	13,75075
9	314	3,14	230	2,3	3,620014	8,326032
10	362	3,62	342	3,42	4,173392	14,273
11	387	3,87	275	2,75	4,461609	12,26943
12	333	3,33	214	2,14	3,839059	8,215587
13	382	3,82	173	1,73	4,403966	7,618861
14	382	3,82	195	1,95	4,403966	8,587733
15	386	3,86	301	3,01	4,450081	13,39474
16	381	3,81	352	3,52	4,392437	15,46138
17	380	3,8	183	1,83	4,380908	8,017062
18	382	3,82	180	1,8	4,403966	7,927139
19	393	3,93	192	1,92	4,530782	8,699101
20	364	3,64	226	2,26	4,196449	9,483975

21	381	3,81	251	2,51	4,392437	11,02502
22	384	3,84	306	3,06	4,427023	13,54669
23	367	3,67	180	1,8	4,231035	7,615864
Total		86,74		57,06		248,3177
CSI Index		62,07%				
Interpretasi		Very Poor				

Sumber: Data primer, diolah 2023.

Berdasarkan tabel 2, rata-rata ekspektasi presepsi responden sebesar 3.77 dengan nilai terbesar terletak pada item nomor 7 sebesar 3.97 dan nilai terkecil terdapat pada item nomor 9 sebesar 3.14. Pada tingkat kepuasan Masyarakat memiliki nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat sebesar 2.48 dengan nilai terendah pada item 4 sejumlah 1.68 dan nilai tertinggi pada item 16 sebesar 3.52. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 12 item yang tingkat kepuasannya masih di bawah rata-rata.

CSI Index menunjukkan berada di angka 62,07% yang merujuk pada kategori *Very Poor*. Secara umum presepsi masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta masih harus dilakukan perbaikan kinerja.

Nugroho et al., (2021) menyebutkan bahwa meskipun program pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah berjalan lama, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan dalam program pemberantasan kemiskinan adalah lemahnya sasaran program. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Penetapan sasaran merupakan aspek penting dalam program pengentasan kemiskinan. Apabila program pengentasan kemiskinan tidak mencapai target yang diharapkan, maka tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan atau bahkan lebih buruk lagi hingga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa petugas harus memegang prinsip 4 T yakni Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi.
2. Proses penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dinilai kurang adil dengan nilai kinerja 1,74 dari nilai harapan 3,90. Hal tersebut didukung oleh observasi di lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada 100 responden sehingga ditemukan fakta bahwa sebagian besar penerima manfaat dinilai tidak sesuai dengan kriteria Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditentukan dalam Permensos No.1 Tahun 2018.
3. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, penetapan kelompok penerima manfaat (KPM) dinilai kurang merata dengan nilai kinerja 1,68 dari nilai harapan 3,89. Angka tersebut dapat diartikan bahwa penetapan KPM yang merata dinilai penting agar program CCT di Kota Surakarta berjalan secara maksimal. Pada realisasinya, penetapan KPM dinilai kurang merata. Hal

tersebut didukung dengan melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang dinilai berhak sebagai penerima manfaat belum termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima manfaat. Aguila et al., (2017); Bergstrom & Dodds, (2021) menyatakan bahwa dengan anggaran yang sama, program CCT akan lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan jika dilakukan dengan penargetan yang baik.

Akar permasalahan dari tidak adil dan meratanya penetapan KPM oleh petugas dapat disebabkan oleh pendataan yang tidak dilakukan secara berkala. Menurut penelitian (De Matteis, 2013; Parawangi & Wahid, 2023; Nugroho et al., 2021) ketepatan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, pengkinian dan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala sangat diperlukan untuk memperoleh data yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendataan secara berkala dinilai memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan skor rata-rata 3,8. DTKS menjadi acuan dalam menetapkan KPM. Penetapan KPM ditentukan berdasarkan data yang tertera dalam sistem DTKS dan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas. Pendataan yang valid dianggap penting karena sangat menentukan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kondisi perekonomian masyarakat setiap waktunya mengalami perubahan, sehingga diperlukan verval data secara berkala untuk mengetahui kondisi terbaru dari masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Pendataan secara berkala diharapkan akan memperoleh data yang lebih valid sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga diharapkan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan akan menekan angka kemiskinan lebih maksimal. Menurut Parawangi & Wahid, (2023) hal utama untuk menghindari penargetan penerima manfaat yang tidak tepat, dapat ditelusuri dari sumber data yang tidak akurat, termasuk persoalan substansi dan implemmentasi. Dalam hal tersebut terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tingkat keberlanjutan yakni keakuratan, ketersediaan, dan pemfilteran data. Masyarakat menilai bahwa teguran oleh petugas sangat penting dilakukan apabila terdapat penerima manfaat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil analisis yang tercantum pada tabel 2, pemberian sanksi pencabutan manfaat bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mematuhi aturan secara terus menerus juga dinilai memiliki tingkat kepentingan yang tinggi oleh masyarakat. Hasil tersebut dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan adanya GAP sebesar 2.01 pada atribut tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pelaksanaannya yang didukung oleh fakta di lapangan bahwa petugas tidak memberikan teguran dan sanksi pencabutan manfaat bagi penerima manfaat yang tidak memenuhi aturan secara terus menerus. *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang dilakukan di Mexico (Bergstrom & Dodds, 2021) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan penerima bantuan untuk mengalokasikan dana bantuan untuk investasi pada pendidikan dan kesehatan.

Bantuan sosial tunai dan non tunai yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat pemerintah dalam Permensos No.11 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa salah satu manfaat diberikannya bantuan sosial adalah sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat menilai bahwa adanya peningkatan pendapatan merupakan atribut penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan nilai kepentingan 3,82. Ternyata pada realitanya bantuan sosial belum mampu mendorong masyarakat dalam meningkatkannya secara signifikan dengan nilai kepuasan 1,95. Hasil yang sama ditemukan oleh Parker (2017) yang meneliti dampak yang dihasilkan oleh program *Conditional Cash Transfer* (CCT) di Mexico. Program tersebut bernama PROGRESA yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja khususnya bagi laki-laki.

Dalam penelitian (Beltran & Delgado, 2023) menemukan bahwa insiden dan tingkat keparahan menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik. Dalam artian program CCT tidak membawa dampak secara adil pada distribusi pendapatan dan hanya mencegah naiknya angka kemiskinan. CCT dinilai hanya menghasilkan dampak ekonomi dalam jangka pendek, bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Kota Surakarta bahwa KPM wajib mengalokasikan bantuan tunai dari pemerintah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana arahan dari pemerintah, BNPT wajib dibelanjakan bahan pangan yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Dalam hal ini bantuan sosial PKH juga wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan masing-masing komponen.

Pendataan secara berkala dinilai memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan skor rata rata 3,8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS dijadikan acuan dalam menetapkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Penetapan KPM ditentukan berdasarkan data yang tertera dalam sistem DTKS dan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas. Pendataan yang valid dianggap penting karena sangat menentukan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kondisi perekonomian masyarakat setiap waktunya mengalami perubahan, sehingga diperlukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui kondisi terbaru dari masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Pendataan secara berkala diharapkan akan memperoleh data yang lebih valid sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga diharapkan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan akan menekan angka kemiskinan lebih maksimal. Menurut (Parawangi & Wahid, 2023) hal utama untuk menghindari penargetan penerima manfaat yang tidak tepat, dapat ditelusuri dari sumber data yang tidak akurat, termasuk persoalan substansi dan implemtnasi. Dalam hal tersebut terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tingkat keberlanjutan yakni keakuratan, ketersediaan, dan pemfilteran data.

Kesesuaian bantuan yang diterima oleh KPM dinilai penting dengan nilai harapan 3,88 dan nilai kinerja 3,21. Bantuan oleh pemerintah sudah dinilai adil dengan nilai kinerja 2.73 dari nilai harapan 3.96. Pendistribusian yang merata juga sudah dilakukan pemerintah dengan baik dengan nilai kinerja 3.08 dari nilai harapan 3.97. Pendistribusian bantuan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dengan nilai kinerja

3.09 dari nilai kepentingan 3.86. Keempat hal tersebut didukung oleh fakta di lapangan bahwa hampir semua KPM telah menerima bantuan oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Persyaratan dinilai dapat dipenuhi dengan baik ditunjukkan dari nilai kinerja 2.75 dan nilai kepentingan 3.87.

Pada atribut 5,6,7,8 berkaitan dengan pendistribusian bantuan baik BPNT maupun PKH di Kota Surakarta sudah sesuai dengan aturan pemerintah sebagaimana tertulis dalam Permenos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Persyaratan dalam bantuan tunai mempunyai dampak yang cukup besar terhadap pengentasan kemiskinan (Kitaura & Miyazawa, 2021). Penelitian tersebut diperjelas oleh Bergstrom & Dodds, (2021) bahwa CCT mengarahkan dana bantuan kepada rumah tangga miskin dan juga mengurangi kemiskinan di masa depan dengan mengaitkan akses dana bantuan dengan beberapa syarat seperti investasi kepada sumber daya manusia dan anak-anak. Hal yang sama dengan bantuan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini, bantuan sosial diberikan dengan syarat pengalokasian bantuan tunai sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan. Kinerja aktual berkaitan dengan persyaratan bantuan yang telah ditetapkan pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai mudah dipenuhi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode IPA, komponen-komponen yang ditetapkan pemerintah dalam program bantuan sosial di Kota Surakarta dinilai dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat miskin.

Bantuan sosial bersyarat dari pemerintah dinilai dapat membuka akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat atribut nomor 15 yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat setelah terlaksananya program. Atribut tersebut dinilai sudah baik oleh masyarakat dengan nilai kinerja aktual sebesar 3.01 dan nilai kepentingan sebesar 3.86. Kesejahteraan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial. Didukung oleh fakta bahwa dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lebih baik dari sebelum bantuan diberikan.

Bantuan yang diberikan pemerintah penting untuk diimbangi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan dari pemerintah dengan nilai kepentingan 3,84. Kemampuan masyarakat sudah dinilai baik dengan fakta di lapangan bahwa

masyarakat dapat memanfaatkan program dari pemerintah sesuai dengan anjuran yang ditunjukkan dari nilai kinerja sebesar 3.06. Masyarakat menilai bahwa tingkat kepentingan keberlanjutan program ini tinggi dengan nilai 3.81 dan kinerja pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program ditunjukkan dengan nilai 3.52 yang mana sudah sejalan dengan harapan masyarakat.

Menurut Winter (2006) dalam (Parawangi & Wahid, 2023) menyebutkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan terdapat tiga variabel yang berpengaruh. Variabel tersebut diantaranya adalah perilaku organisasi dan antar organisasi (*organizational and inter-organizational behavior*), perilaku birokrasi tingkat bawah (*street level bureaucratic behavior*), dan perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*).

Atribut nomor 9, 12, dan 20 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 membutuhkan komitmen dan peran yang baik dari petugas tingkat bawah maupun aparat desa (*street level bureaucratic behavior*).

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kinerja pemerintah dalam pendistribusian program yang dinilai penting perlu untuk dipertahankan. Atribut-atribut tersebut sangat berpengaruh terhadap penilaian IPA dan CSI secara keseluruhan. Keberlanjutan program dengan mempertahankan atribut yang ada pada kuadran 2 perlu untuk dijaga. Selanjutnya diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, petugas tingkat bawah, dan masyarakat untuk dapat mencapai keberhasilan program. Komitmen petugas tingkat bawah perlu untuk ditingkatkan dalam melayani masyarakat. Penerapan *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam proses pemberian bantuan dari awal hingga akhir perlu untuk dipahami baik bagi petugas maupun masyarakat. Peran aktif masyarakat diperlukan untuk melapor pada pemerintah apabila terdapat petugas tingkat bawah maupun KPM yang tidak menaati SOP.

Pemerintah hendaknya memaksimalkan kinerja aktual pada atribut-atribut yang menjadi prioritas. Sosialisasi mengenai program yang meliputi hak dan kewajiban KPM serta pemerintah harus dilakukan dengan lebih intensif oleh petugas kepada masyarakat langsung pada tingkat RW agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih jelas. Pendataan KPM dapat dilakukan pembaharuan dan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali agar data yang diperoleh merupakan data terbaru yang valid sehingga ketepatan sasaran program dapat tercapai. Petugas dapat memberikan peringatan secara tersurat bagi KPM yang tidak menaati aturan. Apabila aturan tidak ditaati secara terus menerus maka petugas dapat memberikan sanksi berupa pencabutan manfaat bagi KPM sebagaimana tercantum dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Selanjutnya kebijakan pemerintah terkait besaran dan peruntukkan bantuan perlu dikaji ulang agar bantuan yang diberikan dapat lebih berdampak khususnya dalam meningkatkan pendapatan KPM. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan tingkat graduasi penerima manfaat PKH dan BPNT baik graduasi alamiah maupun graduasi sejahtera mandiri sehingga angka kemiskinan di Kota Surakarta dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- A`laa, R. D., & Sutikno, S. (2019). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v7i2.36635>
- Aguila, E., Kapteyn, A., & Tassot, C. (2017). Designing cash transfer programs for an older population: The Mexican case. *Journal of the Economics of Ageing*, 9, 111–121. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.09.001>
- Alamanda, A. (2021). the Effect of Economic Growth on Income Inequality:Panel Data Analysis From Fifty Countries. *Info Artha*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1176>
- Ariyoso. (2009). Konsep Importance Performance Analysis (IPA). *Statistik 4 Life*.
- Arsyad, L. (2006). *Ekonomi Daerah: Pengantar Perencanaan Pembangunan* (Edisi Kedu). BPFE.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen), 2021-2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Balasubramanian, P., Burchi, F., & Malerba, D. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low- and middle-income countries. *World Development*, 161, 106119. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106119>
- Baldwin, R. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*. PT. Bina Aksara.
- Beltran, L. D., & Delgado, M. C. (2023). Estimating the economic and social impact of conditional cash transfers from the Prospera Program in Mexico. *Evaluation and Program Planning*, 100(May), 102321. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102321>
- Bergstrom, K., & Dodds, W. (2021). The targeting benefit of conditional cash transfers. *Journal of Public Economics*, 194, 104330. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104330>
- Breunig, R., & Majeed, O. (2020). Inequality, poverty and economic growth. *International Economics*, 161(September 2019), 83–99. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.11.005>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>

- Cox, D. (2004). Outline of Presentation on Poverty Allevation Programs in The Asia Pacific Region.
- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdspd.v7i1.4533>
- De Matteis, A. (2013). Relevance of poverty and governance for aid allocation. *Review of Development Finance*, 3(2), 51–60. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2013.04.001>
- Dewi, D. (2018). Modul Uji Validitas dan Reliabilitas. In *Statistika Terapan* (2018th ed., Issue October). Universitas Diponegoro. https://www.researchgate.net/publication/328600462_Modul_Uji_Validitas_dan_Reliabilitas
- Djojohadikusumo, S. (1994). dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. In *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Edisi pert). Pustaka LP3ES.
- Eboli, L., & Mazzulla, G. (2009). A new customer satisfaction index for evaluating transit service quality. *Journal of Public Transportation*, 12(3), 21–37. <https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.3.2>
- Ghozali, I. (2006). Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS (Edisi 1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habimana, D., Haughton, J., Nkurunziza, J., & Haughton, D. M. A. (2021). Measuring the impact of unconditional cash transfers on consumption and poverty in Rwanda. *World Development Perspectives*, 23(November 2020), 100341. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100341>
- Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, D. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19. *Catatan Penelitian SMERU*, 2, 1–8.
- Herzer, D., & Vollmer, S. (2013). Rising top incomes do not raise the tide. *Journal of Policy Modeling*, 35(4), 504–519. <https://doi.org/10.1016/j.jpmod.2013.02.011>
- UNFPA. (2023). State of World Population Report (SWOP) 2023 Highlights, 8 Billion Lives, Infinite Possibilities: The Case for Rights and Choices. UNFPA.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.

- Kitaura, K., & Miyazawa, K. (2021). Inequality and conditionality in cash transfers: Demographic transition and economic development. *Economic Modelling*, 94(October 2020), 276–287. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.10.008>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2018). *Manajemen Pemasaran (Edisi 12)*. PT Indeks.
- Kouadio, H. K., & Gakpa, L. (2022). Do economic growth and institutional quality reduce poverty and inequality in West Africa? *Journal of Policy Modeling*, 44(1), 41–63. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.09.010>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Salemba Empat.
- Malthus, T. (1798). *an Essay on the Principle of Population, As It Affects the Future Improvement of Society With Remarks on the Speculations of Mr Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. In *Environment and Ecology in the Long Nineteenthcentury: Volume I: Scientific and Professional Perspectives on Environment*, 1789-1858. <https://doi.org/10.4324/9780429355653-13>
- Masset, E., & García-Hombrados, J. (2021). Sensitivity matters. Comparing the use of multiple indicators and of a multidimensional poverty index in the evaluation of a poverty eradication program. *World Development*, 137, 105162. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105162>
- Mayangsari, A. (2015). Dampak Pemberdayaan Pengrajin Batik Oleh Diskoperindag dan ESDM terhadap Peningkatan Kesejahteraan UMKM Batik Jetis Sidoarjo. 3, 293–298.
- Min, J., & Rao, N. D. (2023). Growth and Inequality Trade-Offs to Eradicate Absolute Poverty. *SSRN Electronic Journal*, 9(11), e21441. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4364956>
- Muhamad Samsudin, Aji Ratna Kusuma, & Suarta Djaya. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 77. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/501>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Ngubane, M. Z., Mndebele, S., & Kaseeram, I. (2023). Economic growth, unemployment and poverty: Linear and non-linear evidence from South Africa. *Heliyon*, 9(10), e20267. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20267>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Nunnally, J.C dan Bernstein, I. . (1994). *The Assesment of Reliability*. *Psychometric Theory*, 3.

- Parasuraman A Parsu, A. Zeithaml, V., & L Berry, L. (1988). SERVQUAL A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Parawangi, A., & Wahid, N. (2023). Journal of Local Government Issues (LOGOS) Poverty Alleviation in the Hope Family Program in Makassar. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 49–62.
- Perera, L. D. H., & Lee, G. H. Y. (2013). Have economic growth and institutional quality contributed to poverty and inequality reduction in Asia? *Journal of Asian Economics*, 27, 71–86. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.06.002>
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty : History, Measurement, and Policy*.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy, and Taxation*. On the Principles of Political Economy, and Taxation. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107589421>
- Ristanti, P. W., & Suryanto, S. (2023). The perceptions and satisfaction index of Yogyakarta's citizens on congestion and air pollution. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(1), 54–68. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i1.16394>
- Rostow, W. W. (1960). *he Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.
- Sari, O. A., & Nachrowi, N. D. (2023). Pengaruh Kerawanan Pangan, Bantuan Pangan dan Jaminan Kesehatan terhadap Keluhan Kesehatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.01>
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Credit, Interest, and the Business Cycle*. In *Social Science Electronic Publishing (Vol. 25, Issue 1, p. 255)*.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan (Ed.1. Cet.)*. Rajawali Pers.
- Smith, A. (2007). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*. In *London Business School Review (Vol. 26, Issue 3, pp. 46–49)*. <https://doi.org/10.1111/2057-1615.12058>
- Song, Y., Gao, J., & Zhang, M. (2023). Study on the impact of energy poverty on income inequality at different stages of economic development: Evidence from 77 countries around the world. *Energy*, 282(August), 128816. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128816>
- Stiglitz, J. E. (2013). *The Price of Inequality : How Today's Divided Society Endangers Our Future*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

- Syukri, S. H. A. (2014). Penerapan Customer Satisfaction Index (CSI) Dan Analisa GAP Pada Kualitas Pelayanan Trans Jogja. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 13(2), 103–111.
- Todaro, M. ., & Smith, S. . (2012). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 11). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kese). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- UNFPA
- World Bank (2024), *Poverty and Inequality Platform* (version 20240326_2017_01_02_PROD) [data set]. pip.worldbank.org. Accessed on 2024-05-25